

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia, taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga Kami dapat menyusun “ **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018** ” dengan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 berdasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/3003 tentang Perbaikan pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud untuk memberikan informasi secara garis besar, sederhana dan ringkas mengenai visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik di Bangkalan

Semoga dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, dapat memberikan pedoman dan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Mudah-mudahan Allah SWT, selalu memberikan bimbingan dan petunjuk yang benar sehingga kita dapat meneruskan tugas melalui pengabdian masing-masing demi kemajuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

Bangkalan, 28 Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**SUGENG TOMI FIRYANTO,SP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620812 198603 1 023

## DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
C. DASAR HUKUM .....	5
D. GAMBARAN UMUM SKPD .....	6
E. ORGANISASI .....	7
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. PERENCANAAN KINERJA .....	11
1. VISI .....	11
2. MISI.....	12
3. TUJUAN.....	13
4. SASARAN.....	14
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA .....	16
B. ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN.....	17
BAB IV PENUTUP .....	18

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rencana Strategis
2. Rancana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
3. Penetapan Kinerja 2018
4. Pengukuran Kinerja
5. IKU ( Indikator Kinerja Utama)
6. Program dan Kegiatan Tahun 2018

**TABEL**

**NOMOR**

TABEL 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Ruang Pada Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bangkalan .....	6
TABEL 2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.....	7
TABEL 3 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan .....	7

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan laporan capaian kinerja (*performance*) selama tahun 2018 yang mengacu pada perencanaan strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008.

Rencana Strategik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dijabarkan dalam rencana kinerja (Renja) tahun 2018 sebagaimana komitmen untuk pelaksanaan kinerja tahun 2018. Sesuai dengan rencana kinerja tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik cara untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui 6 program dan 21 kegiatan.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian sasaran tersebut sumber anggaran yang digunakan sebesar Rp. 2.010.596.745,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.604.833.630,- seluruhnya berasal dari dana APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 79,82% dengan kategori **berhasil**.

Dari capaian kinerja dengan katagori sangat berhasil tersebut cara pencapaiannya untuk tahun 2018 disamping melalui 6 program dan 21 kegiatan, juga melalui pembagian tugas kepada masing – masing Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

*Lampiran*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Era Otonomi Daerah telah berjalan sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik( Good Governance ) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, bersih dan tanggungjawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga. Pentingnya hal tersebut telah disadari pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera di upayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini mewujudkan suatu pemerintahan yang baik ( GoodGovernance ) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kinerja dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan ( LAKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan memiliki wewenang lebih luas didalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi UU No. 32 / 2004 ini meliputi : demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip – prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi di orientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya local. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil dari kegiatan pembangunan yang di lakukan secara berkesinambungan. Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang persial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bangkalan dibutuhkan suatu pendekatan sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek – aspek yang fundamental dan strategis. Dengan demikian diharap keseluruhan elemen masyarakat Kota Bangkalan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bangkalan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang



dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumberdaya tersebut bersifat spesifik local yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia, serta sumber – sumber pendapatandaerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini ,kemampuan Pemerinntah Daerah Kabupaten Bangkalan didalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bannkalan kearah yang di inginkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut kemudian wajib dikomunikasikan keseluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengerahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen tersebut untuk memajukan kegiatan pembangunan di Bidang Politik di Kota Bangkalan. Selanjutnya, sangat pula dibutuh kanadanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang di dukung oleh tegaknya penegakan hukum( Law Enforcement ) dan di terapkannya prinsip – prinsip Good Governance di lingkungan masyarakat di Kota Bangakalan.

Proses penyusunan LAKIP memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan semmua pihak di dalam pembuatan LAKIP diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan LAKIP yang telah di buat focus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah di tetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 ini adalah untuk menyediakan acuan, arahan kebijakan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

### **2. Tujuan**

Berdasarkan pertimbangan ini maka LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 2.1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- 2.2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2.3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
- 2.4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

2.5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.

### **C. LANDASAN HUKUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286 );
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 );
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Nomor 3851 );
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan;

7. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

#### **D. GAMBARAN UMUM SKPD**

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan yang merupakan unsur penunjang organisasi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Peratran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 4 Tahun 2008 memiliki susunan organsasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga
4. Bidang Kajian Strategis
5. Bidang Integrasi Bangsa
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2008, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuupaten Bangkalan mempunyai tugas yaitu : **"Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik"**.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. ORGANISASI**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (SDM Aparatur ) pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel :

**TABEL 1**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN**  
**RUANG**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan I	0 Orang	
2	Golongan II	13 Orang	
3	Golongan III	25 Orang	
4	Golongan IV	30orang	
<b>Jumlah</b>		<b>41 Orang</b>	

***Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2018***

Sedangkan jumlah potensi sumber daya aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan bila ditinjau dari segi tingkat pendidikan pada tabel 2 dibawah ini :

**TABEL 2**  
**JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT**  
**PENDIDIKAN**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sekolah Dasar	- Orang	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1 Orang	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	12 Orang	
4	Sarjana Muda	1 Orang	
5	Sarjana	25 Orang	
6	Pasca Sarjana	2 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>41 Orang</b>	

**Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2018**

Sedangkan jumlah pegawai yang menduduki jabatan dan staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini :

**TABEL 3**  
**JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN DAN STAF**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BANGKALAN**

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II.a	- Orang	
2	Eselon II.b	1 Orang	
3	Eselon III.a	1 Orang	
4	Eselon III.b	3 Orang	
5	Eselon VI.a	8 Orang	
6	Staf	28 Orang	
<b>Jumlah</b>		<b>41Orang</b>	

**Sumber : Sub Bagian Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Desember 2018**

Dengan dukungan sumber daya aparatur ( SDM ) yang dimiliki tersebut, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan selaku pembantu utama kegiatan Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

## **F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan didasarkan pada Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Kata pengantar

Daftar isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Gambaran Umum SKPD
- E. Organisasi
- F. Sistematika Penyusunan LAKIP

### **BAB II : PENYAJIAN KINERJA**

- A. RPJM ( Rencana Program Jangka Menengah )
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2018
- C. Standart Penilaian Kinerja

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Pengukuran Capaian Sasaran
- B. Penjelasan Pencapaian Sasaran

### **BAB IV : REALISASI ANGGARAN**

- A. Target Belanja Langsung

B. Realisasi Belanja Langsung

**BAB V : PENUTUP**

Lampiran – Lampiran :

1. Rencana Strategis
2. IKU ( Indikator Kinerja Utama )
3. Penetapan Kinerja 2018
4. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) Tahun 2018
5. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2018
6. PengukuranCapaian Sasaran ( PPS ) Tahun 2018
7. Program dan kegiatan Tahun 2018



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

RPJM ( Rencana Program Jangka menengah ) merupakan penjabaran dari RPJP ( Rancangan Program Jangka Panjang ) Daerah dimana di dalam penyusunan RPJM dimaksud selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk Renstra, penjabaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai berikut ;

##### **1. VISI**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah mewujudkan Masyarakat yang Demokratis, Agamis, Dan Berbudaya. Pada hakekatnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan sangat strategis mengingat pada tahun 2018 diselenggarakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif yang diharapkan situasi dan kondisi yang aman dan terkendali.

Mengingat pentingnya peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan kiranya perlu diberikan Pendidikan Politik kepada masyarakat sipil guna meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visi yang mengemban makna dan hakekat yang sama sebagaimana diuraikan diatas, visi ini bagi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan aspek perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang lebih mensejajarkan kedudukan masyarakat dengan kedudukan pemerintah dalam suatu proses ( rangkaian kegiatan ) Wawasan ini mengandung substansi bahwa masyarakat tidak hanya didudukkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi juga sebagai subyek pembangunan, sehingga kedua unsur dimaksud sama-sama mengemban faktor determinan, bukan pengemban faktor kontributif.

Oleh karena itu guna menunjang dan mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bangalan, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan telah menetapkan visinya yakni :

**" MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS, AGAMIS, DAN BERBUDAYA "**. Keberadaan visi ini merupakan perwujudan kepedulian kinerja aparatur Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Politik Kabupaten Bangkalan yang searah dengan misi yang diembannya.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan setiap organisasi harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih.

Misi bagi organisasi, pada hakekatnya merupakan pernyataan ( *statement* ) yang menjawab pertanyaan ( *question* ) "mengapa organisasi itu ada". Misi diletakkan sebagai suatu gambaran yang mampu mengkomunikasikan visi pada suatu organisasi, mencerminkan karakter organisasi, serta mengandung nilai-nilai organisasi, sehingga mampu memberikan petunjuk sebagai pemandu dalam mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki.

Eksistensi misi dalam suatu organisasi biasanya lebih bersifat konkrit dibandingkan dengan eksistensi visi, oleh sebab itu tingkat spesifikasi yang terkandung di dalam pernyataan sebuah misi relatif lebih nampak jika dibandingkan dengan visi dalam suatu organisasi. Misi

biasanya menawarkan keunggulan yang menunjukkan upaya peningkatan efisiensi, menawarkan inovasi serta meningkatkan gairah kerja.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai misi antara lain:

1. Meminimalisir konflik di tengah-tengah masyarakat
2. Meningkatkan semangat Nasionalisme dan rasa cinta nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Berpolitik

### **3. TUJUAN**

Dalam rangka mencapai misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan :

1. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera
2. Mewujudkan semangat masyarakat akan rasa Nasionalisme dan rasa akan cinta terhadap Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat terhadap politik untuk ikut aktif di dalamnya, sehingga tingkat persentase keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik dari tahun ke tahun terus meningkat.

### **4. SASARAN**

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangkalan ditetapkan sasaran :

1. Masyarakat untuk selalu memelihara dan menciptakan lingkungan masyarakat yang damai, aman dan sejahtera.

2. Masyarakat agar selalu ditanamkan rasa rasionalisme dan rasa cinta terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.
3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan politik

## **5. Indikator Kinerja Utama**

Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, yang terdiri dari sekretariat serta beberapa bidang yang saling berinteraksi dan bersinergi dengan demikian organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak akan terlepas dari lingkungannya yang mengakibatkan berpengaruh terhadap perkembangan / pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Melalui kinerja aparatur diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan public secara umum.

## **B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018**

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada puncak sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai dalam tahun tertentu.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berisikan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh adanya evaluasi indikator-indikator kinerja yang ditunjukkan melalui pengukuran dan penilaian kinerja.

Secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan telah dapat melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dengan bukti mengenai keberhasilan tersebut dapat dilihat pada capaian hasil kerja setiap sasaran.

#### **A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN**

Pengukuran pencapaian kinerja harus didasarkan kepada dokumen-dokumen yang telah disepakati dan ditetapkan, yaitu Rencana Strategis dan Rencana Kinerja (Tahunan), serta Data dan Informasi mengenairealisasi kinerja.

Tujuan yang tidak realistis, sasaran yang sulit diukur, data / informasi yang tidak lengkap dan laporan yang tidak sesuai, merupakan penghambat dalam melakukan pengukuran pencapaian kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat diukur melalui PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) yang terdapat dalam lampiran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ✓ 85 s/d 100 % = sangat berhasil
- ✓ 70 s/d 79 % = berhasil
- ✓ 55 s/d 69 % = cukup berhasil
- ✓ 0 s/d 54 % = tidak berhasil.

## **B. ANALISIS CAPAIAN SASARAN**

Analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan berhasil atau sesuai rencana, ini dapat dilihat dari Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dimana di dalam PPS rata-rata pencapaian sasaran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2017 rata-rata persentase 89,11%, sedangkan persentase Tahun Anggaran 2018 rata-rata persentase 89.6%, maka terjadi penurunan persentase 0,5%.

Dilihat dari persentase tersebut, kalau kita melihat kepada indikator penilaian (range penilaian) yang terdapat diatas, kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan masih berada di range **BERHASIL**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan wujud dari tindak lanjut Inpres No. 7 tahun 1999 sekaligus sebagai pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan beberapa paparan yang tersaji dalam laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan untuk Tahun Anggaran 2018 *berhasil* dikarenakan didukung oleh faktor-faktor antara lain :

1. Memanfaatkan anggaran secara maksimal di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
3. Tersedianya sarana dan prasarana peralatan lain yang diperlukan di dalam mendukung tugas;
4. Adanya sistem informasi dan ketersediannya data yang akurat dan valid sebagai bahan untuk menganalisa dalam merumuskan program dan petunjuk teknis;
5. Adanya Sistem dan prosedur kerja yang baku dan dipedomi secara konsisten oleh semua pihak yang ada dalam organisasi;
6. Adanya sistem monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaksanaan tugas;
7. Adanya komitmen yang kuat dan kondusif guna menunjang hubungan antar bagian-bagian dan antara bagian dengan unit kerja lain.
8. Adanya dukungan dari beberapa jasa pihak ketiga.

Dengan tersusunnya LAKIP ini kami sangat mengharapkan masukan dan saran sebagai umpan balik demi perbaikan kinerja pada waktu mendatang ke arah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat di dalam meningkatkan kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan demi mewujudkan VISI dan MISI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan pada khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan pada umumnya.

**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN BANGKALAN**

**SUGENG TOMI FIRYANTO, SP, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620812 198603 1 023



**PENCAPAIAN KINERJA**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	5 unit	33,000,000	96.3
Penyusunan laporan LAKIP OPD tepat waktu	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	1 dok	4,162,700	83.3
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	1 dok	5,000,000	100.0
Pelayanan operasional tingkat OPD	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	12 bln	1,160,442,227	93.5
Terlaksananya Hari jadi Bangkalan	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	1 kali	15,000,000	100.0
Laporan monev tepat waktu		1 dok	8,950,700	72.6
Tersedianya Dokumen RENSTRA OPD		1 dok	14,812,400	49.37
Tersedianya dokumen Renja OPD			4,477,000	89.5
Terciptanya kerukunan antar umat beragama	Persentase pemuda/masyarakat peserta program yg sadar akan wawasan kebangsaan	1096 or	128,152,400	91.67
Terciptanya kader bela negara di masyarakat	Persentase kecamatan dan ormas dan LSM yang dibina	18 kec	369,782,000	81.27
Terciptanya semangat persaudaraan di kalangan generasi muda		65 orng	293,526,750	94.1
Terciptanya pembinaan bela negara		1 kali	50,000,000	100.0
Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerjasama pemerintah dan ormas	Persentase ketercapaian program pendidikan politik masyarakat	140 orang	14,832,200	82.7
Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan PILKADA		1 kali	193,912,610	98.8
Terciptanya kondisi lingkungan daerah yang kondusif		1 dok	54,699,000	94.0
Terciptanya situasi Ipoleksosbud daerah yang aman		3 kali	12,489,200	97.6

Terciptanya forum LSM di masyarakat	120 orang	20,580,200	97.4
Terciptanya pemantauan terhadap orang asing dan lembaga asing	1 dok	3,063,400	65.3
Terciptanya tertib administrasi bantuan keuangan parpol	30 orang	10,939,200	79.2
Terciptanya situasi lingkungan daerah yang aman terkendali	2 kali	2,239,700	52.3
Terciptanya situasi keamanan yang kondusif	1 kali	31,814,200	39.7